



**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 – 2024  
KE PROVINSI BALI  
TANGGAL 6 – 10 MEI 2024**

---

Pelaksanaan kunjungan kerja reses pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI dengan mengunjungi 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Riau, Provinsi Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 6 Mei 2024.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Provinsi Bali, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungannya ke Kantor Gubernur Provinsi Provinsi Bali, yang dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Saan Mustopa, M.Si dan Yanuar Prihatin yang merupakan masing-masing sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, serta didampingi pula oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI.

Adapun topik yang menjadi fokus dari kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali tersebut adalah berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali. Secara umum Pemilihan Umum serentak tanggal 14 Februari 2024 telah diselenggarakan secara sukses, aman, tertib dan damai dan dapat terselenggara secara langung, umum, bebas dan rahasia. Dan sudah kita ketahui bersama dari proses konstitusional yang sudah berjalan, saat ini kita sudah memiliki Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sebagai Bangsa yang besar, walau Pemilu tahun 2024 dapat berhasil terselenggara, tetapi tetap masih ada persoalan-ersoalan dan permasalahan yang harus dibenahi secara bersama oleh Anak Bangsa, baik dari persoalan tekis penyelenggaraan Pemilu maupun persoalan regulasi Pemilu itu sendiri yang masih perlu disempurnakan, yang sudah baik tettap dipertahankan dan yang kurang baik akan diperbaiki sehingga

momentum setelah Pemilu 2024 dapat dijadikan perbaikan untuk Pemilu masa yang akan datang dan secara dekat untuk dibenahi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tanggal 27 November 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi semua program dan tahapan dalam penyelenggara Pemilu 2024 sangat perlu dilaksanakan pada setiap tahapan-tahapannya, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan penting dan krusial yang menjadi catatan kritis anak bangsa pada setiap tahapan Pemilu 2024, utamanya dalam tahapan Pemungutan Suara, Pehitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024. Melalui kunjungan kerja reses ini, Komisi II DPR RI berharap mendapatkan gambaran secara utuh terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan di Provinsi Bali termasuk berbagai persoalan dan permasalahan dalam setiap tahapan Pemilu yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu di Provinsi Bali, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota hingga ke bada Adhoc Pemilu, Kelompok Penyelenggaraan pemungutan Suara (KPPS) begitu juga dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc Pengawas Pemilu hingga sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam menjalankan pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu 2024 .

Dalam kunjungan ke Provinsi Bali, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Pejabat Gubernur Provinsi Bali (diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali) beserta jajaran, KPU Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, dan unsur forkopimda Provinsi Bali (TNI, Polri, dan Kejaksaan) dan juga diikuti oleh mitra Komisi II DPR RI dari Pejabat Kementraian Dalam Negeri dan Pejabat KPU RI.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, dan Bawaslu Provinsi Bali, Penyelenggaraan Pemilu 14 Februari 2024 di Provinsi Bali dapat berjalan tertib, aman dan kondusif dan menjadi satu-satunya Provinsi yang ada di Indonesia tidak ada gugatan atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Umum Legislatif yakni DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tetap untuk Pemilihan Presiden Wakil Presiden ada beberapa gugatan terjadi di 13 (Tiga Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dari kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi Bali, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Bali, penyelenggara pemilu, dan seluruh pihak terkait lainnya, termasuk berbagai elemen masyarakat yang telah berupaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali dan dapat dijadika *Role Model* bagi Provinsi lainnya di Indonesia.

Khusus terkait dengan hibah untuk Pemilihan Kepala Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Bali telah merealisasikan hibah anggaran tahap 1 (40%) kepada KPU Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali, dan anggaran tersebut telah ditransfer ke masing-masing pihak.

Beberapa catatan dari hasil kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali antara lain sebagai berikut:

- Hasil Pemilu PPWP di Provinsi Bali di menangkan oleh Paslon Nomor Urut 2 Prabowo dan Gibran dengan perolehan suara sah sebesar 1.454.640 suara , disusul oleh Paslon Nomor Urut 3 Ganjar- Mahfud dengan perolehan suara sah sebesar 1.127.134 suara, dan selanjutnya Paslon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebesar 99.233 , Total Perolehan Suara Sah sebesar : 2.681.007. Hasil Pemilu Legislatif (DPR-RI) dengan total perolehan suara sah sebesar : 2.460.686. Hasil Pemilu Legislatif (DPRD Provinsi Bali) dengan total perolehan suara sah sebesar : 2.529.941 dan tidak ada pengajuan gugatan PHPU ,dan sebanyak 6 parpol yang mendapatkan kursi yakni Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat dan Nasdem.
- Tingkat Partisipasi Pemilu 2024 di Provinsi Bali sebesar 83,34 %, naik dibandingkan Pemilu 2019 dengan tingkat partisipasi sebesar 81.25%.
- Hasil Pemilu legilatif yang Hasil Pemilu Legislatif Di Provinsi Bali (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indoesia (MK RI).
- Terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  - PSU DPRD Kabupaten Buleleng : Kecamatan Banjar, Desa Pedawa (TPS 5) Pada saat hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024, diterima laporan dari Kecamatan Banjar (Dapil 8) terkait adanya surat suara Dapil 3 (Kubutambahan) yang salah masuk kedalam kotak DPRD Kabupaten di Desa Pedawa TPS 5 sebanyak 298 Surat Suara.
  - PSU DPRD Kabupaten Buleleng: Kecamatan Banjar, Desa Pedawa (TPS 6) Pada saat hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024, diterima laporan dari Kecamatan Banjar (Dapil 8) terkait adanya surat suara Dapil 3 (Kubutambahan) yang salah masuk kedalam kotak DPRD Kabupaten di Desa Pedawa TPS 6 sebanyak 279 Surat Suara.
  - PSU PPWP Kabupaten Buleleng: Kecamatan Banjar, Desa Temukus (TPS 4) hasil penelitian serta pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Desa Temukus menganalisa bahwa 1 orang pemilih ber-KTP luar Kabupaten Buleleng (Pemilih ber-KTP-el Kabupaten Karangasem) yang yang telah menyalurkan hak pilihnya padahal pemilih tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau DPTb di TPS 4 Desa Temukus yang dilayani sebagai pemilih DPK yang hanya diberikan 1 surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
  - PSU PPWP Kabupaten Buleleng: Kecamatan Banjar, Desa Temukus (TPS 5) 5 orang pemilih ber-KTP-el diluar Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng yang tidak terdaftar sebagai DPT dan/atau DPTb di Desa Temukus diberikan hak untuk memilih sebagai DPT
  - PSU PPWP Kabupaten Gianyar : Kecamatan Blahbatuh, Desa Pering (TPS 14) 2 orang Pemilih yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya menggunakan NIK dari luar Provinsi Bali. Hal tersebut diketahui setelah Pengawas TPS memeriksa foto Daftar Hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK).

- Untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahap I sebesar 40% yang dialokasikan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Bali disetujui dan ditandatangani pada tanggal 9 November dan telah dilakukan pencairan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk semua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Khusus untuk Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan NPHD sudah disetujui 100%. NPHD untuk KPU dan Bawaslu di Bali merupakan NPHD yang tercepat ke 2 (dua) setelah NPHD untuk KPU dan Bawaslu di Provinsi Jawa Timur. Sisa NPHD 60% untuk KPU dan Bawaslu di Bali akan diselesaikan pencairannya di bulan Mei 2024.
- Saat ini KPU Provinsi Bali sudah melaksanakan *launching* atau peluncuran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Provinsi Bali.
- Dan pada tanggal 5 Mei secara resmi sudah membuka tahapan ke 2 (dua) Penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah, yang diawali dengan tahap pemenuhan persyaratan dukungan pasangan Calon Perseorangan. Hingga saat ini belum ada yang menanyakan penyerahan dokumen dukungan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada tanggal 8-12 Mei jika tidak ada yang mendaftar Calon Perseorangan, maka tidak ada calon perseorangan yang mendaftar.
- Saat ini juga diselenggarakan Rekrutmen Tes CAT Badan Adhoc PPK tanggal 6-8 Mei 2024. KPU Bali mendapatkan hambatan dalam mendapatkan animo Masyarakat dalam pendaftaran Calon Anggota PPK untuk memenuhi Tiga Kali kebutuhan Anggota PPK. Sudah memperpanjang pendaftaran. Hal ini dikarenakan sektor Pariwisata dan Ekonomi di Bali sudah pulih dan berjalan, sehingga Masyarakat kurang meminati untuk menjadi Anggota Ad Hoc, selain karena Honorinya kecil juga resiko menjadi Anggota Badan Ad Hoc sangat besar dan berhadapan dengan hukum.
- KPU Provinsi Bali selalu berkomitmen dalam Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal yang dijalankan yakni menjadikan Anggota KPPS semuanya Perempuan, juga untuk Pengawas TPS Perempuan serta TNI dan Polrinya juga Perempuan. Pemungutan suara dengan penyelenggaraan semuanya Perempuan berjalan sukses dan tidak ada sengketa hasil Pemilu.
- Pemilu Kedepan KPU Bali mendorong dilaksanakannya *Green Election* dengan tidak menggunakan bahan plastik untuk keperluan Teknik penyelenggara Pemilu sehingga ramah lingkungan.
- Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Bali juga terjadi beberapa kejadian pelanggaran yang tidak diproses oleh pihak terkait, diantaranya di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung. Pelapor dipoto oleh staf Bawaslu dalam memberikan laporan di Kantor Bawaslu dan Foto beredar tersebar luas di Masyarakat sehingga Pelapor tidak dilindungi dan mendapat intimidasi dan tekanan dari Pihak-pihak tertentu. Di Kabupaten Jembrana ada peserta memiliki bukti yang kuat tetapi tidak diproses oleh Bawaslu. Di Kabupaten Klungkung ada Penyelenggara Pemilu berkampanye di Media sosial dengan mengkampanyekan Caleg DPR RI.

Menanggapi berbagai penyampaian dari Pemerintah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, dan Bawaslu Provinsi Bali, Komisi II DPR RI memberikan catatan antara lain sebagai berikut:

- Komisi II DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPU dan Bawaslu di Provinsi Bali telah sukses menyelenggarakan Pemilu 2024 secara aman dan tertib dengan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Bali mencapai 83,3 % dan Hasil Pemilu di Bali tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilu ke MK RI untuk Pemilu Legislatif, hal ini menunjukkan penyelenggara Pemilu di Bali dapat menjalankan tugasnya dengan netral, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- Komisi II DPR RI akan mengevaluasi aturan yang ketat terhadap terjadinya Pratik Pembagian Uang (*Money Politik*) dan Pembagian sembako kepada masyarakat Pemilih dalam Pemilu 2024. Sehingga mengakibatkan *Cost Politik* Caleg menjadi besar dan akan berakibat pada penyelenggaraan negara dalam selama menjabat dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat yang dipilih.
- Komisi II DPR RI akan mengevaluasi ketentuan dan aturan tahapan Kampanye Pemilu, Pemungutan Suara, Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024 untuk diperbaiki dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah November 2024.
- Komisi II DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kementerian dan penggunaan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala daerah serentak 27 November 2024 dan jangka Panjang untuk Pemilu 2029.
- Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Gubernur Bali, Bupati dan Walikota Se-Provinsi Bali dalam menjaga netralitas ASN, dan sepenuhnya mendukung untuk memberikan sanksi yang tegas kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas tersebut.
- Permasalahan SDM dan Kapasitas Badan Ad Hoc masih menjadi permasalahan tersendiri, dikarenakan tidak paham dengan produk Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang sudah diterbitkan. Untuk itu Komisi II DPR RI kedepannya dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah menekankan kepada Penyelenggara Pemilu untuk rekrutmen dan seleksi mendapatkan SDM yang bermutu dan jangan hanya menjalankan Sosialisasi Pemilu hanya ke Masyarakat saja, tetapi juga mensosialisasikan produk hukum Pemilu ke internal penyelenggara Pemilu.
- Komisi II DPR RI juga akan mengevaluasi Permendagri Nomor 54 tahun 2019 terkait dengan program jaminan Kesehatan dan jaminan keselamatan Ketenagakerjaan kepada para penyelenggara pemilu dan meminta Kementerian Dalam Negeri agar menyampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan program dengan menganggarkannya pada saat Pemilihan Kepala daerah serentak pada 27 November 2024 yang akan datang.
- Komisi II DPR RI meminta agar Kesekjenan KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan Permasalahan status Hukum kantor-kantor KPU dan Bawaslu yang ada di Provinsi Bali banyak belum definitif.

Denpasar, 6 Mei 2024,  
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali.